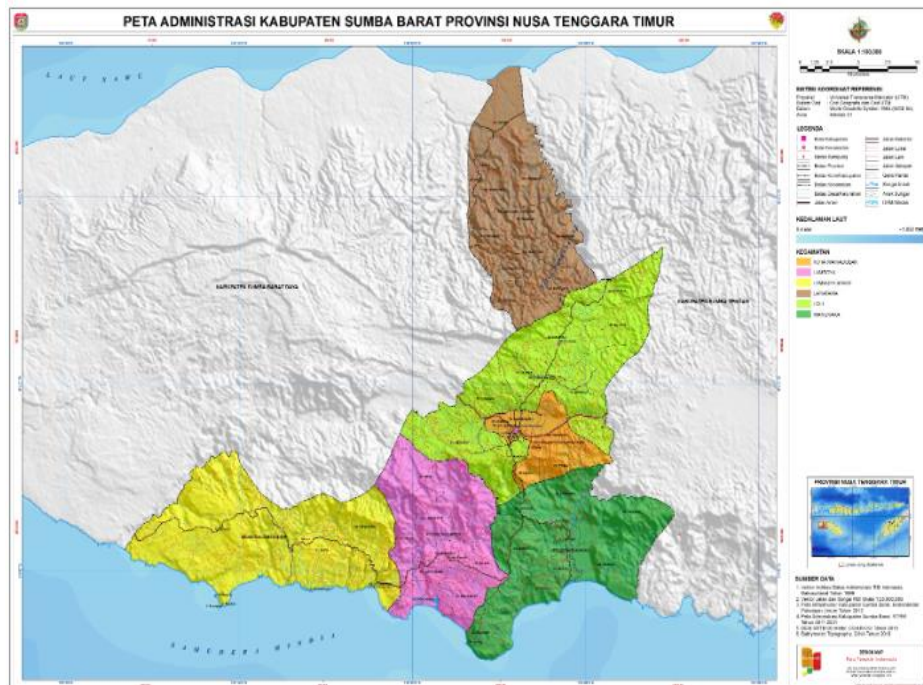


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sumba Barat adalah [kabupaten](#) di [provinsi Nusa Tenggara Timur](#), [Indonesia](#). Ibu kotanya berada di [Kota Waikabubak](#). Kabupaten Sumba Barat pernah mengalami pemekaran wilayah menjadi [Kabupaten Sumba Barat Daya](#) dan [Kabupaten Sumba Tengah](#) pada tahun 2007. Jumlah penduduk kabupaten Sumba Barat pertengahan tahun [2023](#) sebanyak 150.874 jiwa. Kabupaten Sumba Barat terletak di [Pulau Sumba](#) bagian barat dan merupakan [kabupaten](#) dengan luas wilayah terkecil. Secara geografis, Kabupaten Sumba Barat terletak pada 119° 6' 43,61" - 119° 32' 5,87" Bujur Timur dan 9° 22' 24,27" - 9° 47' 50,14" Lintang Selatan. Jaraknya sekitar dari 128 Kilometer dari Kota [Waingapu](#). Luas wilayahnya 737,42 km². (Anonim, 2024)



Gambar 1.1 a Peta Administrasi Kabupaten Sumba Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 357 Tahun 2010, Kabupaten Sumba Barat memiliki 73 ruas dengan Panjang total jalan 444,81 km. Berdasarkan data dari PUPR pada tahun 2015, kondisi Jalan Kabupaten Sumba Barat yang tercatat memiliki kondisi jalan baik sepanjang 102,12 km, kondisi sedang sepanjang 174,38 km, kondisi jalan rusak ringan sepanjang 123,23 km dan kondisi jalan rusak berat sepanjang 99,25 km. Kabupaten Sumba Barat sebagian besar masih ada ruas jalan yang rusak karena berlubang, sempit dan kurang sesuai dengan standar untuk jalan Kabupaten. Keberadaan jalan raya yang sesuai dengan standar sangat diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil. (Anonim, 2010)

Berdasarkan beberapa perkembangan, hingga saat ini terdapat 17 kecamatan, 182 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Sumba Barat. Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa dengan adanya pemekaran, akan mempengaruhi cakupan kecamatan sebagaimana telah di atur dalam Undang-undang tersebut yaitu :

1. Kabupaten Sumba Barat, terdiri dari kecamatan 6 kecamatan : Loli, Kota Waikabubak, Tana Rigu, Lamboya, Wanukaka dan Laboya barat.

Kondisi jalan di Kabupaten Sumba Barat saat ini masih mengalami berbagai masalah dalam hal perawatan dan perbaikan, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan jalan yang dapat membantu pemerintah Kabupaten dalam menjaga kualitas jalan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Pada ruas jalan Kabupaten memiliki tingkat kerusakan seperti gambar berikut ini.



Gambar 1.1 b Kondisi Eksisting Pada Ruas Jalan Kabata Lokona – Karara

Sumber : Survey Inventaris Sumba Barat dengan Aplikasi Blackvue



Gambar 1.1 c Kondisi Eksisting Pada Ruas Jalan Gollu Loloka – Sobarade

Sumber : Survey Inventaris Sumba Barat dengan Aplikasi Black

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dokumen yang berisi tentang rencana pengeluaran dan penerimaan keuangan suatu daerah selama satu tahun anggaran. APBD dibuat oleh pemerintah daerah dan harus disahkan oleh DPRD setempat. Terdapat rincian tentang sumber-sumber pendapatan daerah, seperti pajak dan retribusi, serta rincian pengeluaran untuk berbagai program dan kegiatan, yaitu pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. APBD sangat penting bagi pemerintah daerah karena menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah, sehingga harus disusun secara hati-hati dan transparan agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Kabupaten Sumba Barat memiliki APBD tahun 2023 sebesar Rp763.446.557.667,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Klasifikasi Jalan umum di Indonesia berdasarkan peraturan undang -undang (Pasal 9 UU No. 2 tahun 2022) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan (Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2022). Seiring waktu, kondisi jalan yang telah dioperasikan akan terus menurun. Penurunan ini terjadi karena berbagai faktor, seperti usia jalan, beban lalu lintas, dan kondisi cuaca. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan masyarakat, seperti terganggunya kelancaran transportasi dan meningkatnya biaya operasional kendaraan. Mengingat banyaknya kondisi kerusakan pada ruas jalan kabupaten flores timur, dalam hal itu diperlukan manajemen pengelolaan jalan yang tepat agar penanganan prioritas didasarkan oleh perencanaan.

Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran (PPP) merupakan teknik penganggaran yang bersifat strategis, sistematis, dan terkoordinasi sehingga memberikan hasil yang tepat sasaran. PPP ditujukan untuk membantu pembuat kebijakan di dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan alokasi sumberdaya

secara lebih baik dalam pencapaian tujuan tertentu. Untuk mendukung kegiatan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran (PPP) dalam teknik manajemen aset jalan ini diperlukandata kondisi jalan dan inventarisasi jalan yang ada di jalan Kabupaten, menjadi lebih efisien, untuk pelaksanaan survei dilakukan secara konvensional dengan membutuhkan waktu yang lama maka dilakukan PKRMS. Sehingga dilaksanakan survei menggunakan metode PKRMS yang dapat membantuh dan mempermudah dalam pengumpulan data secara efektif dan efisien. Sehingga pada Studi Tugas Akhir ini ingin melakukan evaluasi menggunakan PKRMS (*Provincial/Kabupaten Road Management System*) pada ruas jalan Kabupaten di Kabupaten Sumba Barat dengan judul “EVALUASI KONDISI KERUSAKAN JALAN MENGGUNAKAN PROGRAM PKRMS PADA RUAS JALAN KABUPATEN SUMBA BARAT. GOLLU LOLOKA-SOBARADE, KABATA LOKONA-KARARA, MAMODU-PAHOLA, KABUKARUDI-NGADU LODA, MALATA-BONDO BOGHILA, DAN WEE PATOLA-LOKORY” dan ingin menganalisis serta mengetahui jenis-jenis kerusakan, nilai Tingkat kerusakan dan merencanakan kebutuhan anggaran biaya untuk penanganan perbaikan kerusakan pada ruas jalan Kabupaten di Kabupaten Sumba Barat.

1.2 Identikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Terjadi jenis-jenis kerusakan akibat beban, LHR, dan umur rencana
2. Tidak diketahui kapan tahun penanganan jalan
3. Belum efektifnya pelaksanaan pengumpulan data dikarenakan masih memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang panjang
4. Tidak didukung dengan database jalan berbasis spasial
5. Perencanaan penanganan jalan tidak mengacu pada PPP

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi perkerasan jalan pada ruas jalan Gollu Loloka-Sobarade, Kabata Lokona-Karara, Mamodu-Pahola, Kabukarudi-Ngadu Loda, Malata-Bondo Boghila, dan Wee Patola-Lokory menggunakan program PKRMS?
2. Bagaimana jenis-jenis penanganan kerusakan pada ruas jalan Gollu Loloka-Sobarade, Kabata Lokona-Karara, Mamodu-Pahola, Kabukarudi-Ngadu Loda, Malata-Bondo Boghila, dan Wee Patola-Lokory berdasarkan hasil PKRMS?
3. Bagaimana pemilihan urutan prioritas berdasarkan kondisi kerusakan pada ruas jalan Gollu Loloka-Sobarade, Kabata Lokona-Karara, Mamodu-Pahola, Kabukarudi-Ngadu Loda, Malata-Bondo Boghila, dan Wee Patola-Lokory berdasarkan hasil PKRMS?
4. Berapa besar prakiraan prediksi biaya penanganan yang diperlukan berdasarkan hasil analisis PKRMS ?

1.4 Tujuan Studi

1. Menganalisis kondisi perkerasan jalan pada ruas jalan Gollu Loloka-Sobarade, Kabata Lokona-Karara, Mamodu-Pahola, Kabukarudi-Ngadu Loda, Malata-Bondo Boghila, dan Wee Patola-Lokory menggunakan program PKRMS.

2. Menganalisis jenis-jenis penanganan kerusakan jalan pada ruas jalan Gollu Loloka-Sobarade, Kabata Lokona-Karara, Mamodu-Pahola, Kabukarudi-Ngadu Loda, Malata-Bondo Boghila, dan Wee Patola-Lokory berdasarkan hasil PKRMS.
3. Menganalisis pemilihan urutan prioritas penanganan jalan pada ruas jalan Gollu Loloka-Sobarade, Kabata Lokona-Karara, Mamodu-Pahola, Kabukarudi-Ngadu Loda, Malata-Bondo Boghila, dan Wee Patola-Lokory berdasarkan hasil PKRMS.
4. Menganalisa besarnya prediksi prakiraan biaya penanganan yang diperlukan berdasarkan hasil analisis PKRMS.

1.5 Batasan Masalah

1. Lokasi studi hanya dilakukan pada ruas jalan yang termasuk JKP 4 di Kabupaten Sumba Barat di ruas jalan Gollu Loloka-Sobarade, Kabata Lokona-Karara, Mamodu-Pahola, Kabukarudi-Ngadu Loda, Malata-Bondo Boghila, dan Wee Patola-Lokory.
2. Data sekunder yang diambil bersumber dari Dinas PUPR Kabupaten Sumba Barat
3. Penilaian kerusakan jalan menggunakan metode SDI & IRI sebagai perbandingan
4. Rencana Anggaran biaya tidak dilakukan secara detail.

1.6 Manfaat Studi

1. Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca tentang Pemeliharaan/preservasi jaringan jalan di Kabupaten Sumba Barat menggunakan PKRMS sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk studi selanjutnya.
2. Bagi penyusun dapat memahami konsep Pemeliharaan/preservasi jaringan jalan di Kabupaten Sumba Barat dan dapat menerapkan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan untuk dunia kerja.
3. Bagi pemerintah Pemkab Kabupaten Sumba Barat memberikan solusi dalam prioritas penanganan kerusakan jalan.

